

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Metro Jateng

Wilayah Berita : Kabupaten Kudus

Halaman 13

Gaji Anggota DPRD Bakal Tembus Rp50 Juta

KUDUS- Gaji anggota DPRD bakal kian melejit setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Kenaikan gaji tinggal menunggu pengesahan Perda sebagai pelaksana teknis PP tersebut.

"Ranperda sudah kami susun dan sekarang sudah kami kirim ke Bagian Hukum Setda untuk dikoreksi. Kami harap, bulan Juli ini Ranperda sudah siap dibahas," kata Ketua DPRD Kudus, Masan, Rabu (5/7) kemarin.

Disinggung mengenai kenaikan gaji yang cukup drastis, Masan mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan pusat. Namun demikian, pihaknya berharap kenaikan gaji ini akan semakin mendongkrak kinerja anggota dewan.

Saat ini, gaji anggota

DPRD Kudus masih berada di kisaran Rp 15 juta per bulan. Namun demikian, take home pay para legislator bisa jadi jauh di atas angka itu mengingat mereka juga berhak mendapatkan honor dari perjalanan dinas yang kisarannya mencapai Rp 6 juta untuk sekali kunjungan kerja luar daerah. Dalam sebulan, para anggota dewan bisa melakukan kunker hingga 3 atau empat kali.

Sekretaris DPRD Kudus, Jadmiko Muhyanto membenarkan kenaikan gaji anggota DPRD

masih menunggu pengesahan perda. Dari estimasi yang ada, gaji para anggota dewan akan meningkat hingga 3 kali lipat.

"Kalau sekarang sekitar Rp 15 juta, mungkin nanti bisa tiga kali lipat hingga hampir Rp 50 juta per bulan," kata dia.

Dikatakan Jadmiko, sebagai Sekretaris DPRD, pihaknya hanya melakukan perencanaan anggaran saja. Sebab, gaji tersebut merupakan hak anggota dewan sebagaimana diatur dalam aturan perundangan.

"Ya kalau sudah ditetapkan, kenaikan gaji akan langsung kami bayarkan," tandasnya.

■ Rp 9 M

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan, tam bahan anggaran untuk memenuhi kenaikan gaji

anggota dewan akan dianggarkan pada APBD perubahan 2017 mendatang. Namun demikian, jika pengesahan perda dilakukan sebelum pengesahan APBD Perubahan, kenaikan gaji anggota dewan tetap bisa diberikan.

"Jadi, meski APBD Perubahan belum disahkan, kenaikan gaji sudah bisa dinikmati asalkan Perdanya sudah disahkan," tandasnya.

Menurut Eko, dari perkiraan yang ada, dibutuhkan Rp 9 miliar untuk menambah anggaran gaji anggota dewan hingga akhir tahun nanti. Sementara, pada 2017, kenaikan gaji bisa dinikmati para legislator selama setahun penuh.

"Kalau untuk tahun ini mungkin baru bisa dicairkan setelah Agustus atau saat perda selesai disahkan," ujarnya. ■ tom-Tj